

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2025**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029**" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan dan perangkat daerah (SKPD).

Adapun substansi penting yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029 secara garis besar meliputi: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangsambung, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan, Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Penutup, serta lampiran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Renstra ini.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT KARANGSAMBUNG



SITI NURIATUN FAQZAH, S.Ag. M.Si
NIP. 1966010519860302

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARANGSAMBUNG	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Karangsembung	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung	31
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	39
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	41
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	48
3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH	49
3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	52
4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF	67
4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	75
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH	79
4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	80
BAB V PENUTUP	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Kecamatan Karangsambung	22
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025.....	22
Tabel 2.3	Komposisi SDM Kecamatan Karangsambung Menurut Jabatan Tahun 2025Tahun 2025	23
Tabel 2.4	Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	23
Tabel 2.5	Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Golongan Tahun 2025.....	25
Tabel 2.6	Aset Tanah Kecamatan Karangsambung.....	27
Tabel 2.7	Gedung dan Bangunan Kecamatan Karangsambung.....	28
Tabel 2.8	Sumber Sarana dan Prasarana Kecamatan Karangsambung	29
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026	35
Tabel 2.10	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025	36
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2025.....	40
Tabel 2.12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	49
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	50
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	51
Tabel 4.1	Uraian program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Karangsambung	54
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah	56
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	57
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan..	67
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	76
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	79
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah gambar.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Karangsambung	10
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Tata Laksana Kecamatan Karangsambung	21
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, mendasari Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada. Dokumen Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029 disusun

merujuk pada visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yaitu meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karangsembung.
2. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
3. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil

evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2024 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan. Selanjutnya tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Karangsambung.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karanggayam; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam, kinerja pelayanan sampai saat ini, Permasalahan pelayanan Kecamatan Karanggayam, dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan renstra Kecamatan Karanggayam, Sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam, Strategi Kecamatan Karanggayam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan Kecamatan Karanggayam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bab V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Karangsambung terbentuk pada tanggal 22 November 2001, ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan Karangsambung meliputi 14 (empat belas) desa yaitu:

1. Desa Widoro
2. Desa Seling
3. Desa Kedungwaru
4. Desa Pencil
5. Desa Kaligending
6. Desa Plumbon
7. Desa Pujotirto
8. Desa Wadasmalang
9. Desa Tlepok
10. Desa Kalisana
11. Desa Langse
12. Desa Banioro
13. Desa Karangsambung
14. Desa Totogan

Secara geografis Kecamatan Karangsambung terletak antara 7,54730 lintang selatan dan 109,67211 bujur timur. Dengan luas 6.515 hektar atau 65,15 km² yang berada diketinggian rata-rata 26 meter dari permukaan laut, batas wilayah kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Karanggayam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sadang
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alian

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Karangsambung
PETA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG



Sumber : Kecamatan Karangsambung Dalam Angka 2024, BPS, 2024.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Karangsambung, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Karangsambung dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Karangsembung berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kecamatan;

- f) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan

pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

- b) Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

Kecamatan; dan

- o) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap

- keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

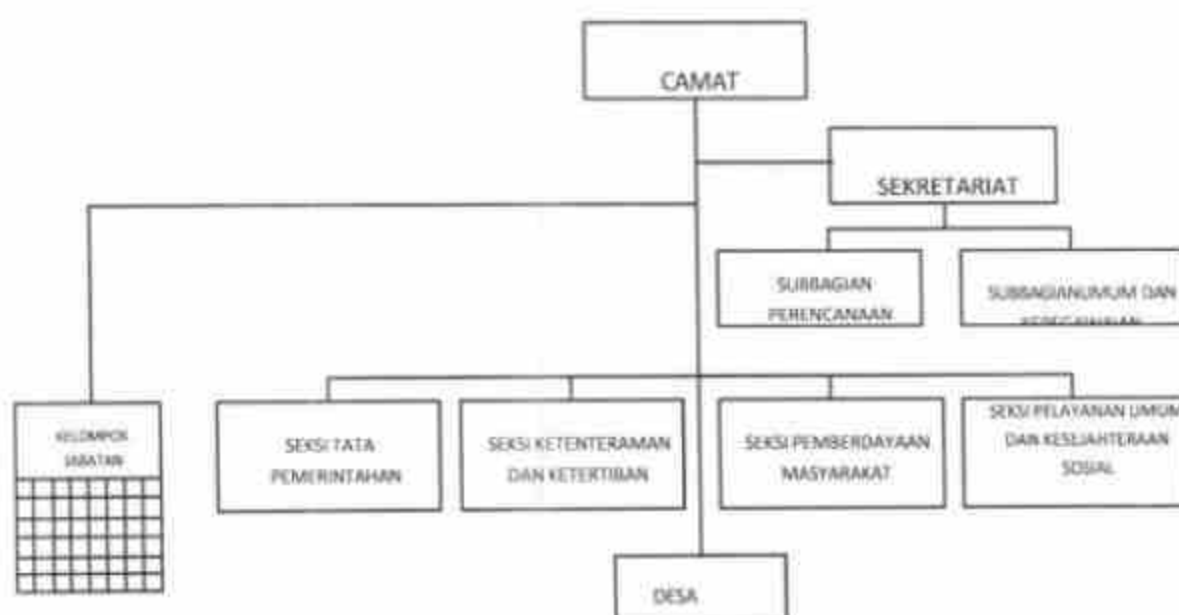
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial

- budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Bagan dan Struktur Organisasi Tata Laksana Kecamatan Karangsambung sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Tata Laksana Kecamatan Karangsambung



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Karangsambung

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia di Kecamatan terdiri dari Tenaga ASN dan Non ASN dengan sebutan Petugas Penunjang Kegiatan (P2K). Aparatur sipil negara (ASN) mempunyai peran penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karangsambung sesuai peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran penyelenggaraan pelayanan publiknya. Untuk itu sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersuadara praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

SDM Kecamatan Karangsambung per 31 Desember 2025 sebanyak 23 orang terdiri dari 20 tenaga ASN dan 3 orang tenaga petugas penunjang kegiatan (non ASN). Selanjutnya komposisi SDM berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Kecamatan Karangsambung

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	14	15	14	14	15
Perempuan	6	6	9	9	8
Jumlah ASN	20	21	23	23	23

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Camat	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	-
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Keteruban	1	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1
9.	Jabatan Fungsional Umum	3	7	10
10.	Bendahara	1	-	1
10.	Arsiparis	1	-	1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan	3	-	3
Jumlah		14	9	23

Tabel 2.3
Komposisi SDM Kecamatan Karangsambung 2025 Menurut Jabatan

No.	Nama Jabatan	Ekselon	Jumlah
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.b	-
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV.a	1
9.	Jabatan Fungsional Umum	-	10
10.	Bendahara	-	1
10.	Arsiparis	-	1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan	-	3
	Jumlah	-	23

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa SDM Kecamatan Karangsambung sebanyak 23 orang, laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan 9 orang. Kemudian komposisi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-				1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1				1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1				1
5.	Kasi Tata Pemerintahan		1				1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1				1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		1				1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1				1

9.	Jabatan Fungsional Umum		2	2	6		10
10.	Bendahara		1				1
10.	Arsiparis		-	1			1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan		1		2		3
Jumlah		2	10	3	8		23

Sesuai tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan SDM pada Kecamatan Karangsambung adalah Sarjana. Kondisi ini tentunya akan sangat mendukung dalam pencapaian mendukung tugas dan fungsi. Tingkat pendidikan yang memadai pada Aparatur Sipil Negara akan menjadi motor penggerak birokrasi sehingga mampu mempercepat implementasi BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal dan Adaptif. Penerapan core value ASN tersebut menjadi amat fundamental, mengingat tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel. Selanjutnya komposisi SDM berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Golongan Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Golongan						Jumlah
		IV	III	II	I	PPPK	P2K	
1.	Camat	1						1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-					1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1					1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1					1
5.	Kasi Tata Pemerintahan		1					1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		1					1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1					1
9.	Jabatan Fungsional Umum		9	1				10
10.	Bendahara		1					1
10.	Arsiparis					1		1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan						3	3
Jumlah		2	16	1		1	3	23

Sumber: Diolah dari Simpeg 2024

Berdasarkan tabel tersebut terlihat, gambaran tingkat golongan SDM di Kecamatan Karangsambung, didominasi golongan III sebanyak 16 orang. Guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal, tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi.

B. Sarana dan Prasarana

Motivasi kerja dan kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh ketersediaan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, motivasi mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan cenderung lebih tinggi. Aktivitas kerja pun akan lebih lancar jika didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang cukup serta dikelola dengan baik. Hal inilah yang kemudian membuat ketersediaan sarana dan prasarana menjadi vital dalam sebuah kantor tak terkecuali bagi Kecamatan Karangsambung. Berikut adalah sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Karangsambung.

1. Aset Tanah Aset tanah ini memiliki peranan strategis sebagai dasar penyediaan infrastruktur pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, serta ruang kegiatan masyarakat. Pengelolaan aset tanah dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi, luas, status kepemilikan, serta pemanfaatan aset tanah di lingkungan Kecamatan Karangambung disajikan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan optimalisasi aset dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode Renstra 2025–2029. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi kepemilikan tanah di Kecamatan Karangsambung.

Tabel 2.6
Aset Tanah Kecamatan Karangsambung

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	337	2017	Jalan Karangsambung Km. 13, Kaligending, Karangsambung	SHG	-	-	Kantor Kecamatan Karangsambung	Pengadaan APBD	94.676.000	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6986	2016	Jalan Karangsambung Km. 13, Kaligending, Karangsambung	SHG	-	-	Kantor Kecamatan Karangsambung	Pengadaan APBD	2.105.413.070	-

Sumber: Kecamatan Karangsambung

2. Aset Bangunan/Gedung Aset bangunan/gedung memiliki peran vital sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, tempat pelayanan administrasi, serta ruang pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, dll. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung dilakukan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi fisik, status kepemilikan, fungsi, serta tingkat pemanfaatan aset bangunan/gedung di lingkungan Kecamatan Karangsambung disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Gedung dan Bangunan Kecamatan Karangsambung

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	-	Kantor Kecamatan Karangsambung	-	SHG	Pengadaan APBD	38.8019.600	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	-	Kantor Kecamatan Karangsambung	-	SHG	Pengadaan APBD	504.859.298	
3	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	790,75	Kantor Kecamatan Karangsambung	790,75	SHG	Pengadaan APBD	3.391.879.750	

Sumber: Kecamatan Karangsambung

3. Sarana dan Prasarana lain

Perlengkapan kantor dan sarana prasarana lainnya merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja di Kecamatan Karangsambung. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai.

Tabel 2.8
Sumber Sarana dan Prasarana Kecamatan Karangsambung/

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAM- BAHAN	PERLU PEMELI- HARAAN
	BAIK	SEDAN G	RUSAK BERAT	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gedung	2			2	2	1	2
Rumah Dinas	0	1	0	1	0	0	1
Kendaraan							
Mobil	1	0	1	2	0	0	1
Sepeda Motor	3	3	0	6	0	0	11
Sepeda Motor Kades	14	0	0	14	0	0	14
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop/ note book	9	1	0	10	0	2	10
Notebook	0	0	0	0	0	0	0
Personal Komputer	7	1	0	8	0	0	8
Lainnya/ PC							
Printer	8	2	5	15	0	5	10
A.C. Split	7	0	0	7	0	3	7
Mesin Ketik Manual	0	0	1	1	0	0	1
Portable							
LCD Proyektor	1	0	1	2	0	2	1
Screen Mate White	1	0	0	1	1	1	1
Standard							
Speaker Aktif	2	0	0	2	2	1	2
Audio Cansette Recorder	0	0	1	1	0	0	0
Pesawat Telephone	1	0	0	1	0	0	1
Camera Digital SLR 600	0	0	0	0	0	1	0
D							
Audio Mixer	1	0	0	1	0	0	1
Dynamic Microphon	1	0	0	1	0	0	1
Kipas Angin	5	0	0	5	0	0	5
Televisi	2	0	1	3	1	2	3
Amplifier	1	0	0	1	0	0	2
Loundapeaker	4	0	0	4	0	0	4
Dispenser	2	0	0	2	2	0	0
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari Kayu	3	0	0	3	2	2	3
Rak Besi	2	0	0	2	2	2	2
Rak Kayu	1	0	0	2	0	0	2
Filing Cabinet Besi	4	3	0	7	0	4	7
Lemari Kaca	2	0	0	2	0	0	2
White Board	1	0	0	1	1	1	0
Meja Rapat	5	0	0	5	2	2	5
Meja Panjang	5	0	0	5	2	2	5
Meja ½ Biro	4	0	0	4	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
Kursi Rapat	40	0	0	40	40	50	40
Kursi Tamu	1	0	0	1	0	0	1
Bangku Tunggu	5	0	0	5	0	2	2
Sofa	2	0	0	2	0	0	2
Minibar/Podium	1	0	0	1	0	0	1
Alat Rumah Tangga Lain-lain	12	0	0	12	0	0	12
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	2	0	2
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	0	0	6
Meja Kerja Pejabat Non Struktural	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	0	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	0	0	6
Meja Kerja Pejabat Lainnya	2	0	0	2	0	0	2
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	0	0	20	0	0	0
Kursi roda	1	0	0	1	1	1	1
Laktasi	0	1	0	1	0	1	1

Sumber: Diolah dari BMD Kecamatan Karangsambung, 2024

Secara keseluruhan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Karangsambung cukup memadai. Bangunan Kantor terdiri dari 2 unit Gedung yaitu Pendopo dan Kantor. Kantor sendiri dibagi peruntukannya antara lain untuk Ruang Pelayanan dan Ruang Kerja Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan, ruang Laktasi dan ruang bermain anak-anak. Dalam praktiknya, pengelolaan area kantor tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab sub bagian umum dan kepegawaian, melainkan juga membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Tak lain, agar sarana dan prasarana bisa digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai prosedur penggunaan.

Sarana kantor yang terjaga, terpelihara dengan baik, selain akan memperpanjang masa manfaatnya juga akan dapat menghemat dari aspek pemeliharannya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung

Pada prinsipnya kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung mengacu pada target/sasaran Renstra sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangsambung Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangsambung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Selanjutnya, capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Karangsambung selama 5 (lima) Tahun kebelakang mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, hal ini antara lain karena adanya kebijakan Kenaikan Harga BBM serta penyesuaian tarif daftar listrik sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Karangsambung setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya tidak mencukupi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Karangsambung sudah tercukupi. Ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya penggunaan Eletter dan pengiriman

materi dalam bentuk digital sebagai bagian dari implementasi e-government

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Secara keseluruhan peralatan dan perlengkapan pada Kantor Kecamatan Karangsambung cukup memadai, namun demikian masih perlu didukung dengan pemeliharaan rutin

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Karangsambung setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan intensitas kegiatan di Kecamatan sehingga dapat mencukupi penjamuan pada setiap kegiatan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun sangat minim, kondisi ini tidak sepadan, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dirasa masih kurang.

2. Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karangsambung dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Pelayanan di bidang Pemerintahan

Capaian pelayanan di bidang pemerintahan dapat dilihat pada kinerja berikut:

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.

- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di bidang pembangunan

Capaian pelayanan pada bidang pembangunan dapat dilihat pada kinerja berikut:

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLT dan Bansos lainnya di wilayah Kecamatan Karangsambung;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Verifikasi dan validasi DTKS
- f. Fasilitasi kegiatan gerakan pangan murah
- g. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- h. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Karangsambung; serta

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". Paten merupakan sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh

Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Karangsambung secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	n	n+1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a.	Indeks Reformasi Birokrasi				%	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	-	-	100,35	102,41	111,97	131,24	-	-	-
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat				%	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	-	102	106	107	106	106*	-	-
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung				%	84,00	85,00	88,36	90,38	91,40	90,47	85,00	84,00	88,52	90,46	93,24	-	100	100	100,18	100,09	104	-	-

Berdasarkan tabel di atas, hasil survei IKM menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2021 nilai IKM berada pada kategori baik dengan nilai 85,00. Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 90,46 yang masuk kategori sangat baik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan sarana pelayanan, penerapan standar pelayanan, serta peningkatan kompetensi ASN.

Tabel 2.10

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rata-rata Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Kinerja Program																			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana umum yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya sumbu-inisiatif	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembebasan pajak kendaraan	Triwulan	12	15	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya pemberian jasa administrasi keuangan kepada perajabat pemata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebutuhan kantor	jumlah/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah/bulan	12	10	12	12	12	10	12	10	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang sediaan dan penggantian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jumlah/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peralatan peranti lunak	jumlah/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum serta rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dan perjanjian dengan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dan perjanjian dalam daerah	Bulan	12	-	12	12	12	-	12	-	12	12	12	-	100	-	100	100	-	100
	Tersedianya kebutuhan umum dan pemrosesan kantor yang memadai	jumlah/tahun	8	8	8	6	-	1	8	24	12	6	-	1	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tersedianya sumber daya kuantitas kesehatan	Unit	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-
	Tersedianya pemeliharaan rumah dinas Camat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tersedianya pemeliharaan rumah/berkas gedung kantor	jumlah / kgr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya Renja, LKIP, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/tgk	8	6	7	7	8	6	8	6	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya penyempurnaan data informasi/statistik daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengisian layanan KTP dan perizinan yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya pelayanan publik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	7	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelengkapan Kebanew dan hari-hari besar keagamaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Komunikasi RI di Kecamatan Karangasem	bulan/tgk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam ketidaksihan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas timor dan pengendalian kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan UKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan di pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Rencana Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rata-rata Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 14 desa	Indeks desa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terlaksananya petugas pengendalian kesehatan dan kenyamanan lingkungan	rt/kep.	52	1	-	-	-	-	52	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	Desa	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Indeks desa	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitas kepada desa tentang program-program pembangunan rumah desa	Indeks desa	12	12	14	14	14	14	14	1	14	14	14	14	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan dan Desa, terlaksananya inisiatif untuk penatggdaan kemiskinan di Kecamatan Karangsambung	Desa	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya monitoring tingkat Kecamatan Karangsambung	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karangsambung

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Karangsambung mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Karangsambung dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Karangsambung.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Karangasambung Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*			Salipada Pelaksanaan	
		Anggaran Pendanaan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Pendanaan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Pendanaan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Pendanaan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Pendanaan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Pendanaan	Realisasi
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Karangasambung	2.010.338.000	1.908.840.426	94,95%	2.270.111.000	1.977.186.788	87,09%	2.334.804.000	2.109.481.589	90,41%	2.368.883.000	2.281.150.488	96,33%	2.585.163.000	2.340.558.500	91,29%	2%	2%
	Pertemuan, Pengkaderan, dan Penguatan Rantai Pasokan Daerah Kabupaten / Kota	30.200.000	20.140.200	66,70%	18.972.000	14.925.700	78,70%	14.200.000	14.163.000	99,74%	14.200.000	14.068.760	99,08%	12.800.000	12.237.138	95,59%	-15%	-17%
	Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	1.999.910.000	1.710.961.882	85,55%	2.082.561.000	1.690.192.932	81,18%	2.023.789.000	1.899.946.093	93,88%	2.145.130.000	2.128.295.180	99,23%	2.580.748.000	2.189.887.321	84,87%	2%	-1%
	Administrasi Umum Peningkat Daerah	41.800.000	41.779.200	99,95%	50.800.000	50.553.700	99,51%	48.838.000	48.724.700	99,80%	49.180.000	49.004.900	99,70%	40.414.000	40.504.370	99,97%	2%	2%
	Pengabdian Masyarakat MUDA Daerah Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	23.000.000	22.992.000	99,96%	10.000.000	10.000.000	100%	23.007.000	22.785.000	99,02%	8.000.000	7.820.000	97,75%	8.000.000	7.412.000	92,65%	22%	20%
	Pengabdian Jasa Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	36.400.000	45.312.164	124,48%	50.400.000	50.123.857	99,45%	48.822.000	48.450.412	99,24%	62.748.000	62.729.312	99,97%	61.804.000	61.824.438	99,90%	2%	4%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	66.715.000	60.405.000	90,54%	27.307.000	26.971.600	98,74%	78.000.000	74.802.424	95,90%	79.625.000	79.332.334	99,63%	58.307.000	53.863.238	92,38%	2%	-1%
2	Program Peningkatan Pelayanan Dasar Pemerintahan Publik	44.140.000	44.144.000	99,99%	43.684.000	43.683.400	99,99%	52.792.000	52.748.400	99,92%	1.341.357.000	1.318.895.079	98,33%	18.128.000	18.108.000	99,93%	100%	100%
	Pelayanan Urutan Pemerintahan yang Dilengkapi dengan Cara	44.140.000	44.144.000	99,99%	43.684.000	43.683.400	99,99%	52.792.000	52.748.400	99,92%	1.341.357.000	1.318.895.079	98,33%	18.128.000	18.108.000	99,93%	100%	100%
3	Program Koordinasi, Kemitraan dan Kerjasama	27.398.000	27.388.800	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	Koordinasi Urutan Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama	27.398.000	27.388.800	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4	Program Peningkatan Urutan Pemerintahan Umum	8.000.000	7.183.000	89,78%	8.000.000	7.994.500	99,93%	8.000.000	7.979.100	99,74%	22.222.000	22.219.500	99,94%	21.167.000	21.109.000	99,73%	20%	77%
	Peningkatan Urutan Pemerintahan Umum sesuai Pergerakan Kepala Daerah	8.000.000	7.183.000	89,78%	8.000.000	7.994.500	99,93%	8.000.000	7.979.100	99,74%	22.222.000	22.219.500	99,94%	21.167.000	21.109.000	99,73%	20%	77%
5	Program Peningkatan Urutan Pemerintahan Umum	75.400.000	75.298.400	99,88%	83.108.000	82.637.000	99,43%	164.814.000	164.032.052	99,53%	112.094.000	111.888.185	99,83%	105.517.000	104.199.100	98,75%	13%	13%
	Facilitas, Administrasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Dasar	75.400.000	75.298.400	99,88%	83.108.000	82.637.000	99,43%	164.814.000	164.032.052	99,53%	112.094.000	111.888.185	99,83%	105.517.000	104.199.100	98,75%	13%	13%

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Karangsambung masih perlu ditingkatkan. Proses pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelayanan berbasis teknologi informasi sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi layanan. Selain itu, standar operasional prosedur pelayanan belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh masyarakat, yang menyebabkan persepsi terhadap kualitas layanan masih bervariasi. Keterbatasan sarana prasarana pendukung serta belum optimalnya kapasitas aparatur kecamatan dalam pengelolaan pelayanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kepastian pelayanan publik.

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah". Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, arah kebijakan penataan ruang Kabupaten Kebumen menekankan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, serasi, dan berwawasan lingkungan guna mendukung dinamika pembangunan wilayah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Kecamatan Karangsambung ditetapkan sebagai bagian dari kawasan pedesaan dengan fungsi utama sebagai wilayah lindung dan penyangga lingkungan, khususnya kawasan konservasi geologi dan sumber daya alam. Wilayah ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung fungsi lindung kawasan hulu, serta pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata berbasis lingkungan.

Pada sistem jaringan prasarana wilayah, Kecamatan Karangsambung didukung oleh jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan kawasan sekitarnya, serta prasarana pendukung lainnya yang menunjang aksesibilitas dan pelayanan dasar masyarakat. Keberadaan jaringan sungai dan sumber daya air juga menjadi elemen penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan memperhatikan arahan RTRW tersebut, Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029 diarahkan pada penguatan fungsi wilayah sebagai kawasan lindung dan pusat pengembangan kegiatan berbasis konservasi. Arah kebijakan pembangunan kecamatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata alam.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup telah terintegrasi sejak tahap perencanaan pembangunan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa kendala dan isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Karangsambung, yaitu:

1. Potensi bencana tanah longsor dan erosi di beberapa wilayah Kecamatan Karangsambung yang dipengaruhi oleh kondisi

topografi perbukitan, kemiringan lereng yang curam, serta curah hujan yang relatif tinggi.

2. Ancaman kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan daya dukung lingkungan, khususnya pada kawasan lindung dan kawasan konservasi geologi.
3. Pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, terutama di kawasan permukiman padat dan desa-desa yang belum memiliki sarana pengelolaan sampah terpadu.
4. Keterbatasan akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi layak di beberapa wilayah permukiman yang berdampak pada kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Masih ditemukannya kasus stunting dan permasalahan kesehatan lingkungan yang memerlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
6. Rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil telaah di atas, kendala lingkungan hidup tersebut menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029 agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029, arah pembangunan menyesuaikan visi dan misi Kabupaten Kebumen periode 2025–2029, yaitu **“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya”**. Visi ini menekankan tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang bersih dan profesional, pembangunan berkeadilan, pelestarian budaya lokal, serta pemerataan infrastruktur dan ekonomi desa.

Berdasarkan visi tersebut, misi pembangunan Kabupaten Kebumen yang relevan dengan peran Kecamatan Karangsembung meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat secara adil dan inklusif. Kecamatan Karangsembung mendukung misi ini dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
2. Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata lokal. Kecamatan Karangsembung mengarahkan program pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, termasuk pertanian, kerajinan, dan pariwisata alam.
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Karangsembung berfokus pada peningkatan kualitas dan akses infrastruktur wilayah, termasuk jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik, agar mendukung pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Kecamatan Karangsembung melaksanakan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penerapan SOP, dan peningkatan kapasitas aparatur.
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan berbudaya. Kecamatan Karangsembung mendukung penguatan nilai-nilai lokal dan gotong royong masyarakat melalui pelestarian adat, budaya, dan peningkatan keamanan serta ketertiban lingkungan.

Dalam implementasinya, Kecamatan Karangsembung memiliki peran strategis melalui beberapa program unggulan:

1. ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif – Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan aparatur, penerapan merit system, dan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.

2. Desa Berdaya – Memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal, tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun – Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelestarian budaya lokal, termasuk mendukung kegiatan adat, kesenian tradisional, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen, tujuan Kecamatan Karangsambung adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan sasaran utamanya adalah meningkatnya tata kelola kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel, selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Kebumen.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.12
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah - Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	- Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan - Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah - Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan - perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa	- Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal - Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	- Geopolitik dan Geoeкономи - Perkembangan Teknologi Industri 5.0 - Dampak Perubahan Iklim Global	- Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah - Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional - Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal - Belum optimalnya ketahanan pangan - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat - Peningkatan tata kelola kecamatan - Pengembangan potensi wilayah - Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029

Dalam menghadapi era teknologi informasi yang berkembang pesat, Kecamatan Karangsambung dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam setiap lini pemerintahan, termasuk di tingkat kecamatan. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, responsif, cepat, dan akuntabel mendorong perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam sistem kerja dan mekanisme pelayanan.

Perencanaan yang inovatif dan adaptif sangat diperlukan guna mempercepat proses kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam urusan kewilayahan, Kecamatan Karangsambung memiliki tanggung jawab besar dalam lima tahun ke depan untuk berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen.

Dalam merumuskan tujuan jangka menengah, Kecamatan Karangsambung mengacu pada Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Kebumen, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

B. Sasaran Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029

Sasaran jangka menengah Kecamatan Karangsambung adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Sasaran ini sejalan dengan komitmen untuk memperkuat pelayanan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NPSK DAN SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	90,46	90,47	90,48	90,50	90,55	90,60	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangsambung	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Data primer diolah

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dari tahun 2025 – 2029 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2026 sebesar 90,47; target sasaran di tahun 2027 sebesar 90,48; target sasaran di tahun 2028 sebesar 90,50; target sasaran di tahun 2029 sebesar 90,55 ; target sasaran di tahun 2030 sebesar 90,60.

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual melalui analisis yang realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi juga mencakup langkah-langkah yang berisi program-program indikatif sebagai upaya menghadapi lingkungan yang dinamis guna mencapai tujuan atau sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan Karangsambung yang disajikan dengan tabel dibawah ini :

TABEL 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing kemiskinan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian langkah kerja sebagai bentuk operasionalisasi NSPK yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangsembung, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karangsembung.

Berdasarkan tema RPJMD Tahun 2025-2029, salah satu strategi utama yang dilaksanakan adalah strategi nomor 9 (sembilan), yaitu *"Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan Aparatur Sipil Negara yang profesional"*, dengan strategi prioritas berupa *"Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah guna mendukung pemerataan akses pelayanan publik serta program penanggulangan kemiskinan"*.

Selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang disesuaikan dengan peran dan kewenangan perangkat daerah. Berikut disajikan tabel arah kebijakan Renstra Kecamatan Karangsembung:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029 adalah *"Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi."*

Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi serta menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kantor kecamatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan melalui pelatihan serta pengembangan kompetensi.
3. Mendorong partisipasi aktif dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara optimal dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
5. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
7. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara optimal, transparan, dan akuntabel.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi upaya untuk mengetahui capaian keberhasilan dari sasaran dan tujuan tersebut. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsambung dalam rangka mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan ini, diharapkan dapat menjawab serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karangsambung dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Program dan kegiatan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk periode tahun 2025-2029 meliputi:

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

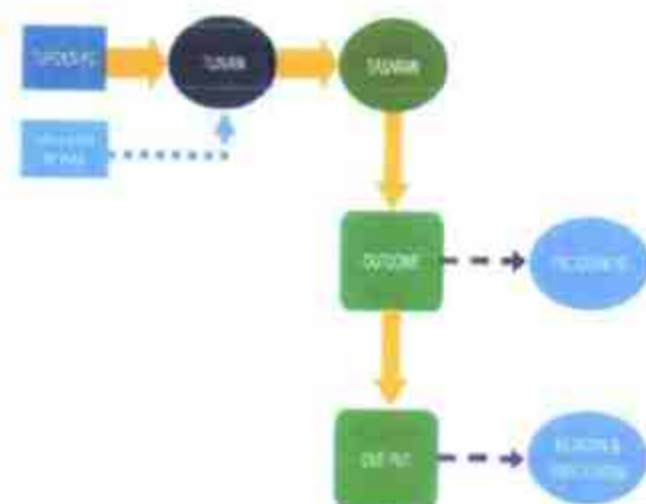
Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen selama tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan untuk Kegiatan yakni merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program. Kegiatan tersebut terdiri dari berbagai tindakan yang melibatkan pengerahan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, barang, peralatan dan teknologi, maupun dana, yang dipadukan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Kegiatan yang dirancang sebagai penjabaran dari program merupakan langkah nyata dalam pencapaian tujuan strategis

Kecamatan Karangsambung. Kegiatan indikatif Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun **2025-2029** diharapkan mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal, sebagai dasar tercapainya sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Karangsambung dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra PD melalui cascading dari tujuan dan sasaran RPJMD. Dilanjutkan dengan penentuan tujuan dan sasaran renstra, serta output dan outcome. Secara lebih rinci, program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan
Karangsambung

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/ Material 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Pembangunan lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/ lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

		Pelaksanaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

SIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karangsembung)	70,90	71,45	2.481.417.280	71,46	2.549.463.789	72,51	2.641.513.645	73,76	2.733.514.777	75,00	2.799.089.413	Kecamatan Karangsembung
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat ketertarikan (Kecamatan Karangsembung)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	Kecamatan Karangsembung
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karangsembung)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.079.289	100	22.811.424	Kecamatan Karangsembung
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan AP/HDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan AP/HDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karangsembung)	100	100	90.000.000	100	97.510.204	100	90.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	Kecamatan Karangsembung

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung						
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Karangsambung					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabili tasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)		
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Person)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tahun Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN	KET.
			APBDes sesuai ketentuan		(Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan:Person)		
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Person)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4
Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

2024-03-17

KODE	SIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.601.417.280		2.676.973.993		2.762.513.645		2.860.594.066		2.927.900.837	
7.01	KECAMATAN					2.601.417.280		2.676.973.993		2.762.513.645		2.860.594.066		2.927.900.837	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.481.417.280		2.548.463.789		2.641.513.645		2.733.514.777		2.799.889.413	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan - Karangsembong) (Dengan Satuan Nilai)	70,00	71,45	72,45		73,46		74,51		75,76		76,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	6	6	6		8		8		8		8		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.263.653.280		2.333.078.126		2.417.185.304		2.507.525.777		2.576.811.413	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Kap dan Tumpukan ASB					2.257.653.280		2.527.078.126		2.432.345.884		2.300.525.777		2.342.811.413	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Penyediaan Kap dan Tumpukan ASB	Jumlah Gerdap yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Syarat - IDAT (gdp 345449 - Gerdap dan ASB)	20	20	20		20		20		20		20		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0002	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Kawasan SKPD					6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Kawasan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Kawasan SKPD (Dengan Satuan: M3)	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.800.000		45.800.000		46.300.000		51.800.000		53.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pasok Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dengan Satuan: Pasok) (Dengan Satuan: Pasok)	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.000.000		17.000.000		17.500.000		19.000.000		19.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pasok Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Pasok) (Dengan Satuan: Pasok)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pasok Barang Cetakan dan Penggandaan (Dengan Satuan: Pasok) (Dengan Satuan: Pasok)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0006	Penyediaan Bahan Sediaan dan Peralatan Perundang-undangan					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
00	00	00	00	00	00	00	00	00	000	000	000	000	000	000	000	
	Terselenggaranya Bekerja Sama dan Penyaluran Perumahan	Jumlah Dokumen Bekerja Sama dan Penyaluran Perumahan (dengan Dikur 2.000.000)	2	1	10		10		10		10		10		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.04.0001	Pengadaan Bahan Material					10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
	Terselenggaranya Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disalurkan (dengan Dikur 2.000.000)	9	1	1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.04.0009	Pengelolaan Aspek Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
	Terselenggaranya Pengelolaan Aspek Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aspek Koordinasi dan Konsultasi SKPD (dengan Dikur 2.000.000)	4	1	1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.04.0010	Pemantauan Arus Dinamis pada SKPD					2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
	Terselenggaranya Pemantauan Arus Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemantauan Arus Dinamis pada SKPD (dengan Dikur 2.000.000)	9	1	10		10		10		10		10		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utang Pemerintah Daerah					25.000.000		20.000.000		20.000.000		13.000.000		10.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utang Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (dengan Dikur 2.000.000)	1	1	2		2		2		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil					0		0		5.000.000		0		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
	Terselenggaranya Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disalurkan (dengan Dikur 2.000.000)	9	1	1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		20.000.000		15.000.000		12.000.000		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
	Terselenggaranya Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disalurkan (dengan Dikur 2.000.000)	2	1	2		2		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPICAWAIAAN	
7.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemungut Utang Pemerintah Daerah					99.000.000		99.000.000		99.000.000		99.100.000		100.700.000		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	06
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemertitahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemertitahan Daerah (Bergeser Setahun Sebelumnya)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menjual				1.800.000		1.800.000		2.000.000		2.100.000		2.200.000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemertitahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemertitahan Daerah (Bergeser Setahun Sebelumnya)	4	4	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000		20.196.944		20.000.000		20.000.000		21.000.000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bergeser Setahun Sebelumnya)	4	4	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor				67.080.944		67.080.000		67.080.000		67.080.000		67.080.000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan (Bergeser Setahun Sebelumnya)	4	4	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertitahan Daerah				29.075.194		45.500.000		43.555.341		50.000.000		51.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertitahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bergeser Setahun Sebelumnya)	28	32	28		28		28		28		28		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		28.000.000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dipelihara (Bergeser Setahun Sebelumnya)	21	21	21		21		21		21		21		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mobil				3.075.194		3.500.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
	Pemeliharaan Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Disediakan (Bergeser Setahun Sebelumnya)	15	15	15		15		15		15		15		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Persewaan dan Mesin Lainnya				5.000.000		4.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
00	00	00	00	00	00	00	00	00	000	000	000	000	000	000	
7.01.02.2.01.0001	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan dan Rasa Aman Warga (Dengan Saluran Air)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		4.500.000		6.559.341		10.000.000		10.000.000	
	Terselenggaranya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dengan Saluran Air)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
7.01.02	PROGRAM PENTELUSNGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
	Terselenggaranya Peningkatan Penguasaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Masyarakat (Kecamatan Karangsembung) (Dengan Saluran Perjan)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dipimpahkan kepada Camat, (Dengan Saluran Perjan)	100	100	100		100		100		100		100		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN RESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pengendalian					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN RESOS
	Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pengendalian	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Karangsembung) (Dengan Saluran Perjan)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN RESOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Keamanan lain yang Dimpahkan					0		0		0		0		0	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN RESOS
	Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Keamanan lain yang Dimpahkan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Karangsembung) (Dengan Saluran Perjan)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN RESOS
7.01.02	PROGRAM PENTELUSNGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan	Indeks Efektivitas Pelayanan (Kecamatan Karangsembung) (Dengan Saluran Perjan)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT

KODE	SIDANG/URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah					20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.079.289		22.011.424	
	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah ... (Dengan Saluran Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SERVIS PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.06.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Silaturahmi Tunggul Melayu Pemertahanan dan Pemertahanan Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.079.289		22.011.424	KEPALA SERVIS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Silaturahmi Tunggul Melayu Pemertahanan dan Pemertahanan Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Silaturahmi Tunggul Melayu Pemertahanan dan Pemertahanan Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	50		50		50		50		50		KEPALA SERVIS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBIYARAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DESA					90.000.000		97.522.294		90.000.000		94.000.000		94.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karangambangi) (Dengan Saluran Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					90.000.000		97.522.294		90.000.000		94.000.000		94.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Saluran Desa)	14	14	14		14		14		14		14		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SERVIS TATA PEMERINTAHAN
	Pengembangan Fasilitas Pengembangan Kawasan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Ditandatangani dalam rangka Pendayagunaan Aset Desa dan Pengembangan Kawasan Desa (Dengan Saluran Desa)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SERVIS TATA PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
7.01.06.2.01.0004	Facilities: Pelaksanaan Pemukiman Rakyat Desa					0		7.400.000		0		0		0	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
	Terdapatnya Fasilitas Pemukiman Pemukiman Rakyat Desa	jumlah, jumlah, 14 (14) orang	0	0	0		0		0		0		0		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0005	Rekomendasi: Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
	Terdapatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberantasan Penyakit Desa	jumlah, jumlah, 14 (14) orang	0	0	14		14		14		14		14		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Facilities: Sistemisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SEKSI PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
	Terdapatnya Fasilitas Sistemisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah, jumlah, 14 (14) orang	0	0	14		14		14		14		14		KEPALA SEKSI PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Facilities: Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kelembagaan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KESETIAAN
	Terdapatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kelembagaan Desa	jumlah, jumlah, 14 (14) orang	0	0	14		14		14		14		14		KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KESETIAAN
7.01.06.2.01.0013	Facilities: Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	KEPALA SEKSI PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
	Terdapatnya Fasilitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah, jumlah, 14 (14) orang	0	0	14		14		14		14		14		KEPALA SEKSI PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0014	Facilities: Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					45.000.000		45.510.204		45.000.000		45.000.000		45.000.000	KEPALA SEKSI PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
	Terdapatnya Fasilitas Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah, jumlah, 14 (14) orang	0	0	14		14		14		14		14		KEPALA SEKSI PEMERIDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KRISIS

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten, Kecamatan Karangsambung memiliki peran strategis sebagai unit kerja terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan kecamatan harus berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Subkegiatan yang dirancang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan kabupaten. Pelaksanaan subkegiatan juga memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Secara umum, uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah di Kecamatan Karangsambung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
KECAMATAN KARANGSAMBUNG				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan:Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karangasambung) (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kondusivitas	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Indeks)		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan organisasi atau lembaga. Pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra), indikator kinerja digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan pembangunan yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang mencerminkan kinerja kepala perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjukkan kinerja seluruh perangkat daerah secara terpadu.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karangsambung. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga pada akhir periode Renstra diharapkan tercapai kondisi kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	%	90,46	90,47	90,48	90,50	90,55	90,60	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

N O	INDIKATO R	SATUA N	TARGET TAHUN						KET
			202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karangsambung selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka mencapai visi Kabupaten Kebumen, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.”

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029 tetap akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan program transisi, yaitu program sementara yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan sebelum ditetapkan Renstra baru yang sepenuhnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan Tahun 2025–2029.

Program transisi tersebut tetap berpedoman pada Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah termuat dalam:

1. Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029;
2. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029; dan
3. RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2045.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangsambung setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan terarah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Karangsambung berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Karangsambung berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi, berpedoman pada dokumen Renstra Kecamatan dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029, Kecamatan wajib menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2025–2029 merupakan salah satu indikator dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja lima tahunan maupun tahunan. Dokumen ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2025–2029, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT KARANGSAMBUNG



SITI NURIATUN FAOZIYAH, S.Ag. M.Si
NIP. 1966010519860302

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahya Riyadi	
ln Cahya	

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja



2. Cascading



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

2024-03-17

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.401.417.280		2.476.973.993		2.762.513.645		2.860.594.064		2.927.900.837			
7.01	KECAMATAN				2.401.417.280		2.476.973.993		2.762.513.645		2.860.594.064		2.927.900.837			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.401.417.280		2.549.463.789		2.641.533.645		2.732.514.777		2.799.089.413			
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan - Sarungsambung) (Dengan Satuan Nilai)	70,80	71,45	71,45		71,46		72,31		73,76		75,00		LAMAT	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.300.000			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan Dokumen)	13	13	14		14		14		17		18		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.01.2.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan Dokumen)	5	5	6		6		6		8		8		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.243.633.280		2.333.678.128		2.417.145.304		2.507.525.777		2.579.811.413			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2023	2024		2025		2026		2027		2028		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
001	01	01A	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gai dan Turangan ASK					2.257.653.380		2.327.078.124		2.411.165.854		2.506.525.777		2.143.811.413	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tetapan Anggaran Turunan ASK	Jumlah Anggaran Mekanisme Gai dan Turangan - ASK - (Dengan Satuan Berbilang)	0	20	20		20		20		20		20		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SARO					6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tetapan Anggaran Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SARO	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Rekod dan Peleburan Audit SARO (Dengan Satuan Berbilang)	0	5	5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.800.000		45.300.000		46.300.000		51.800.000		51.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan Belanja)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tetapan Anggaran Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralat Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (SKD, SKK, SKK, SKK) (Dengan Satuan Belanja)	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.000.000		17.000.000		17.500.000		19.000.000		19.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralat Bahan Logistik Kantor (SKD, SKK, SKK, SKK) (Dengan Satuan Belanja)	14	14	14		14		14		14		14		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000		7.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Peralat Barang Cetakan dan Penggandaan (SKD, SKK, SKK, SKK) (Dengan Satuan Belanja)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.04.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Penyandingan					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	01	01	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	01
	Penyediaan Bahan, Baran dan Peralatan Penunjang Urusan:	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Urusan yang Ditawarkan (Ditawarkan) (Ditawarkan)	2	2	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Bahan Material					10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Ditawarkan (Ditawarkan) (Ditawarkan)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD					2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyelenggaraan "Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD (Ditawarkan) (Ditawarkan)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SAPD					2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SAPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis dan Arsip yang SAPD (Ditawarkan) (Ditawarkan)	2	2	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					23.000.000		20.000.000		20.000.000		13.000.000		10.489.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Ditawarkan) (Ditawarkan)	1	1	2		1		2		1		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil					2		2		5.000.000		2		1.689.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Ditawarkan (Ditawarkan) (Ditawarkan)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		20.000.000		25.000.000		17.000.000		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Ditawarkan (Ditawarkan) (Ditawarkan)	2	1	2		2		2		1		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99.885.304		99.085.443		99.089.000		99.189.300		106.780.000	

KODE	SIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGASUTAN/ SUBKEGASUTAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASIS/RE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	06
	Penyediaan jasa Pemertajahan Grosir Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemertajahan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Meluruskan					1.800.000		1.800.000		2.000.000		2.100.000		2.200.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tambahan/kekurangan jasa Surat Meluruskan	Angka Laporan Tambahan/kekurangan Surat Meluruskan (Dengan Satuan/Bulan)	1	1	10		10		10		10		11		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Kamtibmas, Sumbat Baga dan Lain-lain					10.000.000		10.100.000		10.200.000		10.300.000		10.400.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan jasa Kamtibmas, Sumbat Baga dan Lain-lain	Jumlah Laporan Tambahan/kekurangan Kamtibmas, Sumbat Baga dan Lain-lain yang diserahkan (Dengan Satuan/Bulan)	1	1	11		11		11		11		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, yang diserahkan (Dengan Satuan/Bulan)	1	1	10		10		10		10		11		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemertajahan Grosir Pemerintah Daerah					25.075.194		25.300.000		25.525.194		25.750.000		25.975.194	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemertajahan Grosir Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan/Unit)	25	32	35		36		40		40		40		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa Pemertajahan, Baga Pemertajahan, dan Pagar Kandang Pemertajahan Baga atau Kandang Baga lainnya					24.000.000		24.300.000		24.600.000		24.900.000		25.200.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tambahan/kekurangan Pemertajahan, Baga Pemertajahan dan Pagar Kandang Pemertajahan Baga atau Kandang Baga lainnya	Jumlah Laporan Tambahan/kekurangan Pemertajahan, Baga Pemertajahan dan Pagar Kandang Pemertajahan Baga atau Kandang Baga lainnya (Dengan Satuan/Bulan)	11	11	11		11		11		11		11		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0005	Pemeliharaan Mobil					3.075.194		3.100.000		3.200.000		3.300.000		3.400.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tambahan/kekurangan Pemeliharaan Mobil	Jumlah Laporan Tambahan/kekurangan Pemeliharaan Mobil (Dengan Satuan/Bulan)	11	11	11		11		11		11		11		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		5.100.000		5.200.000		5.300.000		5.400.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	100	101	102	103	104	105	106
	Tertindakannya Pemenuhan Peran dan Wewenang Masyarakat	Luas Peran dan Wewenang yang Berada di Tangan Saluran	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEMASABAH
7.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		6.000.000		6.999.999		10.000.000		10.000.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEMASABAH
	Tertindakannya Pemenuhan Peran dan Wewenang Masyarakat	Luas Peran dan Wewenang yang Berada di Tangan Saluran	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEMASABAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
	Tertindakannya Pemenuhan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karangasem) (Dengan Satuan Personel)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.000.000		10.000.000		10.999.999		11.000.000		12.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan Personel)	100	100	100		100		100		100		100		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Negeri					10.000.000		10.000.000		10.999.999		11.000.000		12.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
	Tertindakannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Negeri	Luas Peran dan Wewenang yang Berada di Tangan Saluran	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
	Tertindakannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Luas Peran dan Wewenang yang Berada di Tangan Saluran	5	5	5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.079.289		12.911.429	
	Meningkatnya Kualitas Kecamatan	Indeks Kualitas Kecamatan (Kecamatan Karangasem) (Dengan Satuan Personel)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029				
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.05.2.01	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Potensi Daerah					20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.079.289		22.011.424	
	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Potensi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Potensi Daerah (Dengan Saluran Regulasi)	2	2	2			2		2		2		2	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KRISIS
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Kelembagaan Kabupaten dan Kabupaten Nasional dalam rangka Mendukung Penguatan Penguatan, Pelaksanaan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Peraturan Menteri Desa, Tanggal 14 serta Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Kabupaten Negara Kabupaten Kabupaten Indonesia					20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.079.289		22.011.424	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN PERTAHANAN
	Pembinaan Kelembagaan Kabupaten dan Kabupaten Nasional dalam rangka Mendukung Penguatan Penguatan, Pelaksanaan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Peraturan Menteri Desa, Tanggal 14 serta Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Kabupaten Negara Kabupaten Kabupaten Indonesia	Jumlah Kegiatan Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Potensi Daerah (Dengan Saluran Regulasi)	2	2	2			2		2		2		2	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN PERTAHANAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGALAMAN PEMERINTAHAN DESA					96.000.000		97.513.204		98.000.000		99.000.000		99.000.000	
	Meningkatkan jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karangasem) (Dengan Saluran Resmi)	100	100	100			100		100		100		100	CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa					96.000.000		97.513.204		98.000.000		99.000.000		99.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa (Dengan Saluran Resmi)	10	10	10			10		10		10		10	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWATAN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi, Pengembangan Kelembagaan Desa dan Penguatan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
	Fasilitasi, Pengembangan Kelembagaan Desa dan Penguatan Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Potensi Daerah (Dengan Saluran Regulasi)	2	2	2			2		2		2		2	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

KODE	SIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET		PASU
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
7.01.06.2.01.0006	Fasilitas: Peningkatan Fasilitas Ruang Desa					0		7.000.000		0		0		0	KEPALA DESA1 TATA PEMERINTAHAN
	Terdapatnya Fasilitas Tersebut (Ruang Desa)	jumlah Dokumen Fasilitas yang telah dilaksanakan dan terdapat Ruang Desa (dalam satuan 000.000)	2	3	3		3		3		3		3		KEPALA DESA1 TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	Bekasmandi: Peningkatan dan Peningkatan Perangal Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA DESA1 TATA PEMERINTAHAN
	Terdapatnya Bekasmandi Peningkatan dan Peningkatan Perangal Desa	jumlah Dokumen Peningkatan dan Peningkatan Perangal Desa (dalam satuan 000.000)	3	4	4		4		4		4		4		KEPALA DESA1 TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitas: Sistemisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA DESA1 PEMERINTAHAN MASYARAKAT
	Terdapatnya Fasilitas Sistemisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen Sistemisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dalam satuan 000.000)	3	4	4		4		4		4		4		KEPALA DESA1 PEMERINTAHAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitas: Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kelembagaan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA DESA1 KEMAHAM DAN KELEMBAGAAN
	Terdapatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kelembagaan Desa	jumlah Dokumen Fasilitas yang telah dilaksanakan dan terdapat Kelembagaan dan Kelembagaan Desa (dalam satuan 000.000)	2	3	3		3		3		3		3		KEPALA DESA1 KEMAHAM DAN KELEMBAGAAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitas: Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Partisipasi					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	KEPALA DESA1 PEMERINTAHAN MASYARAKAT
	Terdapatnya Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Partisipasi	jumlah Dokumen Fasilitas yang telah dilaksanakan dan terdapat Peningkatan Pembangunan Partisipasi (dalam satuan 000.000)	3	4	4		4		4		4		4		KEPALA DESA1 PEMERINTAHAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0014	Fasilitas: Penyelenggaraan Program dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	KEPALA DESA1 PEMERINTAHAN MASYARAKAT
	Terdapatnya Fasilitas Penyelenggaraan Program dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa	jumlah Dokumen Fasilitas yang telah dilaksanakan dan terdapat Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa (dalam satuan 000.000)	3	4	4		4		4		4		4		KEPALA DESA1 PEMERINTAHAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	Bekasmandi: Peningkatan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA DESA1 PELAYANAN UMUM DAN KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Manajemen Fasilitas Pemukiman, Pemertan-pertan Denda di Bantul	Luas lahan yang telah dibangun Tahun 2024 - 2025	0	1	1		1		1		1		1		Luas lahan yang telah dibangun Tahun 2024 - 2025
TOTAL				2.361.417.000		2.474.911.000		2.750.312.000		2.880.334.000		2.927.900.833			

4. Rumus Perhitungan Indikator

[illegible]

5. SK Penyusunan Renstra



CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 700.1.1.2/1180 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. Pembentukan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045; dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KELIMA : dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung
pada tanggal 15 September 2025

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN



SITI NURIATUN FAOZIYAH

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 700.1.1.2/1180 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
2	Camat Karangsembung	Ketua
3	Sekretaris Camat Karangsembung	Sekretaris
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karangsembung	Ketua Kelompok Kerja
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karangsembung	Wakil Ketua Kelompok Kerja
6	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangsembung	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karangsembung	Anggota
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karangsembung	Anggota
9	Perencana Ahli Pertama	Anggota

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN



SITI NURIATUN FAOZIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 700.1.1.2/1180 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

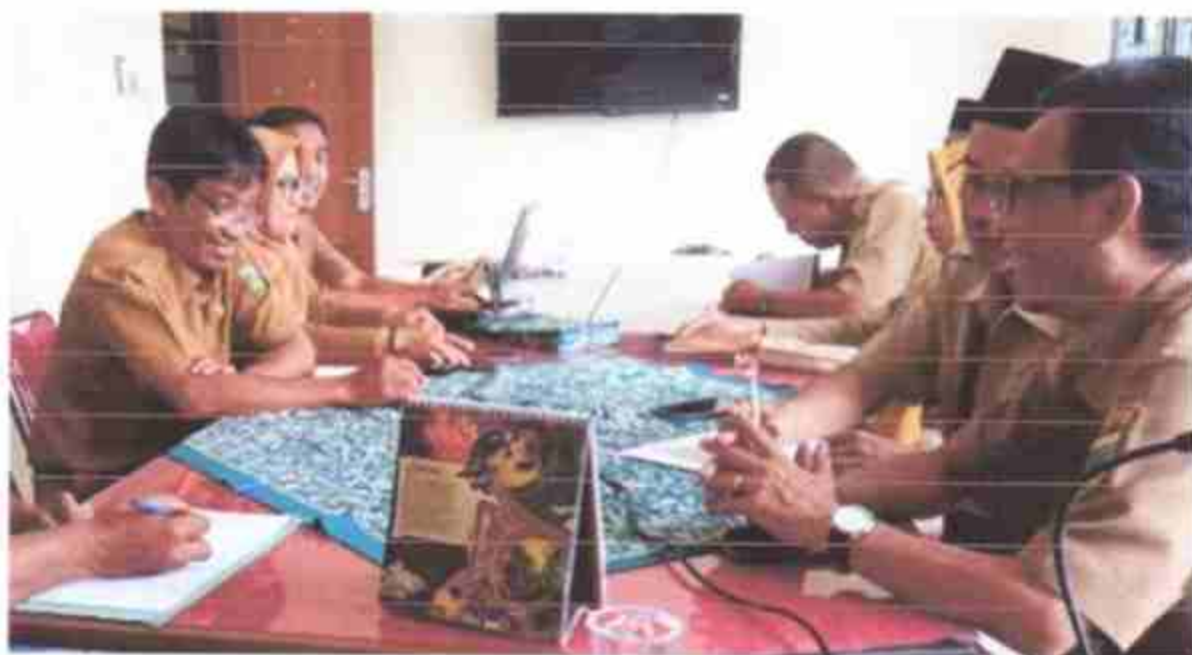
NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Karangsembung	Ketua
2.	Bagus Hidayatullah, A.Ma.	Anggota
3.	Suwarjo	Anggota
4.	Suprapti Dewi	Anggota
5.	Diana Rahmawati, A.Md.	Anggota

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN



SITI NURIATUL FAOZIYAH

6. Pelaksanaan Forum Renstra



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF 5-TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KEKAMATAN				2.801.417.280,30		2.870.573.833,30		2.762.513.495,30		2.580.333.888,30		2.507.811.253,30		
7.01.01 - PROGRAM PENGUNCIK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-KOTA				2.481.417.280,30		2.540.433.829,30		2.441.313.480,30		2.720.014.537,30		2.786.088.253,30		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecara Perangkat Daerah	Indeks SAKSI Perangkat Daerah (nilai)	70,36	71,41	2.481.417.280,30	71,41	2.540.433.829,30	72,51	2.641.513.480,30	73,71	2.723.514.517,30	75,01	2.789.018.253,30	7.01.01.00.00.20.00 00 - KECAMATAN KAPALINDASARI (34)	
7.01.01.2.01 - Peningkatan, Penggunaan, dan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,30		10.000.000,50		10.000.000,70		10.000.000,90		
Terdapatnya Dokumen Pelaksanaan, Penggunaan, dan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	10.000.000,00	8	10.000.000,30	8	10.000.000,50	8	10.000.000,70	8	10.000.000,90		
	Jumlah Laporan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.02.0001 - Peningkatan Efisiensi Pelaksanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,30		5.000.000,50		5.000.000,70		5.000.000,90		
Terdapatnya Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,30	4	5.000.000,50	4	5.000.000,70	4	5.000.000,90		
7.01.01.2.02.0002 - Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,30		5.000.000,50		5.000.000,70		5.000.000,90		
Terdapatnya Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,30	4	5.000.000,50	4	5.000.000,70	4	5.000.000,90		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.267.633.280,30		2.337.077.888,30		2.417.135.144,30		2.507.575.817,30		2.583.811.253,30		
Terdapatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menemai Gal dan Tindakan ASN (Orang/Gal)	20	20	2.267.633.280,30	20	2.337.077.888,30	20	2.417.135.144,30	20	2.507.575.817,30	20	2.583.811.253,30		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Mutu Keuangan SAPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.02.0001 - Peningkatan Gal dan Tindakan ASN				2.257.813.280,30		2.327.077.888,30		2.411.135.144,30		2.500.575.817,30		2.583.811.253,30		
Terdapatnya Gal dan Tindakan ASN	Jumlah Orang yang Menemai Gal dan Tindakan ASN (Orang/Gal)	20	20	2.257.633.280,30	20	2.327.077.888,30	20	2.411.135.144,30	20	2.500.575.817,30	20	2.583.811.253,30		
7.01.01.2.02.0002 - Peningkatan Pelayanan Mutu Keuangan SAPD				6.000.000,00		6.000.000,30		6.000.000,50		7.000.000,70		7.000.000,90		
Terdapatnya Peningkatan dan Pengawasan Mutu Keuangan SAPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Mutu Keuangan SAPD (Dokumen)	4	4	6.000.000,00	4	6.000.000,30	4	6.000.000,50	4	7.000.000,70	4	7.000.000,90		
7.01.01.2.03 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				44.800.000,00		40.800.000,00		40.800.000,30		51.800.000,50		53.800.000,70		
Terdapatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Mutu Keuangan yang Disetujui (Dokumen)	4	4	44.800.000,00	4	40.800.000,30	4	40.800.000,50	4	51.800.000,70	4	53.800.000,90		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada SAPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF 5-TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD) (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komitmen Instruksi Lurah/Pemangku Bangsa Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Ransel Cetak dan Pengembangan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.1001 - Penyelenggaraan Komponen Instansi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Uraian Penyelenggaraan Bangsa dan Kantor														
Tersedianya Komponen Instruksi Lurah/Pemangku Bangsa dan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instruksi Lurah/Pemangku Bangsa dan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.1004 - Penyelenggaraan Bahan Logistik Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.1005 - Penyelenggaraan Barang Cetak dan Pengembangan				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Pengembangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengembangan yang Disediakan (Paket)	4	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00		
7.01.01.2.06.1006 - Penyelenggaraan Bahan Bekas dan Perawatan Perundang-undangan				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Tersedianya Bahan Bekas dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bekas dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00		
7.01.01.2.06.1007 - Penyelenggaraan Bahan Material				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.1008 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD) (Laporan)	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
7.01.01.2.06.1010 - Penyelenggaraan Angka Dasar pada SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Angka Dasar pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Angka Dasar pada SKPD (Dokumen)	4	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengiriman Barang Darat Perantara (Gedung Perantara) Darat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Pengiriman Barang Darat Perantara (Gedung Perantara) Darat	Jumlah Unit Perantara dan Gedung yang Disediakan (Unit)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
	Jumlah Paket Model yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BOKRAF TA-HUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.000 - Pengaliran Mabel				0.00		0.00		0.00 000.00		0.00		0.00 000.00		
Terdapatnya Mabel	Jumlah Pasok Mabel yang Disediakan (Unit)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00 000.00	0	0.00	0	0.00 000.00		
7.01.01.2.01.000 - Pengaliran Pasokan dan Mesin Lainnya				20.000.000.00		20.000.000.00		10.000.000.00		10.000.000.00		5.000.000.00		
Terdapatnya Pasokan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Pasokan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	20.000.000.00	1	20.000.000.00	0	10.000.000.00	1	10.000.000.00	0	5.000.000.00		
7.01.01.2.02 - Penyelenggaraan Jasa Perangai Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000.00		80.000.000.00		80.000.000.00		80.100.000.00		100.700.000.00		
Terdapatnya Penyelenggaraan Jasa Perangai Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Sumber Daya Air dan Lahan yang Disediakan (Laporan)	4	12	80.000.000.00	12	80.000.000.00	10	80.000.000.00	12	80.100.000.00	12	100.700.000.00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Sertifikasi (Laporan)	4	12		12		10		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urusan Kotor yang Disediakan (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.001 - Penyelenggaraan Jasa Sertifikasi				1.000.000.00		1.000.000.00		2.000.000.00		2.100.000.00		2.300.000.00		
Terdapatnya Penyelenggaraan Jasa Sertifikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Sertifikasi (Laporan)	4	12	1.000.000.00	12	1.000.000.00	12	2.000.000.00	12	2.100.000.00	12	2.300.000.00		
7.01.01.2.02.002 - Penyelenggaraan Jasa Sertifikasi, Sumber Daya Air dan Lahan				30.000.000.00		30.100.000.00		30.000.000.00		30.000.000.00		31.000.000.00		
Terdapatnya Jasa Sertifikasi, Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Sumber Daya Air dan Lahan yang Disediakan (Laporan)	4	12	30.000.000.00	12	30.100.000.00	12	30.000.000.00	12	30.000.000.00	12	31.000.000.00		
7.01.01.2.02.004 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urusan Kotor				87.000.000.00		87.000.000.00		87.000.000.00		87.000.000.00		87.500.000.00		
Terdapatnya Jasa Pelayanan Urusan Kotor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urusan Kotor yang Disediakan (Laporan)	4	12	87.000.000.00	12	87.000.000.00	12	87.000.000.00	12	87.000.000.00	12	87.500.000.00		
7.01.01.2.03 - Pemeliharaan Bangun Muka Daerah Perangai Urusan Pemerintahan Daerah				30.000.000.00		41.000.000.00		42.000.000.00		30.000.000.00		31.000.000.00		
Terdapatnya Pemeliharaan Bangun Muka Daerah Perangai Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan dan Jasa Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	30.000.000.00	0	42.000.000.00	0	42.000.000.00	0	30.000.000.00	0	31.000.000.00		
	Jumlah Rencana dan Prosedur Gedung Kotor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		0		1		1			
	Jumlah Mabel yang Disediakan (Unit)	10	10		10		20		20		20			
	Jumlah Penerimaan Perangai Urusan atau Kandang Urusan lainnya yang Disediakan dan Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.03.001 - Penyelenggaraan Pemeliharaan Bangun Perangai Urusan Pemerintahan, dan Pagar Kandang Perangai Urusan Pemerintahan dan Kandang Urusan lainnya				20.000.000.00		20.000.000.00		20.000.000.00		20.000.000.00		20.000.000.00		
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan Bangun Perangai Urusan Pemerintahan, dan Pagar Kandang Perangai Urusan Pemerintahan dan Kandang Urusan lainnya	Jumlah Kandang Perangai Urusan atau Kandang Urusan lainnya yang Disediakan dan Disediakan (Unit)	10	10	20.000.000.00	10	20.000.000.00	10	20.000.000.00	10	20.000.000.00	10	20.000.000.00		
7.01.01.2.03.002 - Pemeliharaan Mabel				3.000.000.00		3.000.000.00		4.000.000.00		4.000.000.00		4.000.000.00		

REKAPITULASI PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tindaklanjuti Pemeliharaan Mutu	Jumlah Mutu yang Diuji (Unit)	15	15	3.075.548,00	15	3.000.000,00	20	4.035.000,00	25	4.830.000,00	20	4.035.000,00		
7.01.01.2.05.0000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		6.030.000,00		6.830.000,00		7.030.000,00		7.030.000,00		
Tindaklanjuti Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa (Unit)	5	5	7.000.000,00	5	8.000.000,00	6	9.030.000,00	5	7.030.000,00	5	7.030.000,00		
7.01.01.2.05.0000 - Pemeliharaan Rehabilitasi Bangun dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		6.030.000,00		6.838.341,00		10.030.000,00		10.030.000,00		
Tindaklanjuti Pemeliharaan Rehabilitasi Bangun dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi (Unit)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.938.341,00	1	10.030.000,00	1	10.030.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGSARAAN PEMERIKHA DAFTAR PELAKSIAN PUBLIK				10.000.000,00		10.000.000,00		10.830.000,00		11.030.000,00		12.030.000,00		
Tindaklanjuti Peningkatan Pengawasan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengawasan Masyarakat Kecamatan (%)	100,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.030.000,00	100,00	11.030.000,00	100,00	12.030.000,00	7.01.0-01.0-00-24.01-00 - KECAMATAN KAPANGSAMBUK	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urutan Pengawasan yang Dilaksanakan Setiap Hari				10.000.000,00		10.000.000,00		10.030.000,00		11.030.000,00		12.030.000,00		
Tindaklanjuti Peningkatan Pengawasan Masyarakat	Jumlah Sampel Sampel Pengawasan Sampel yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.030.000,00	4	11.030.000,00	4	12.030.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lain yang Dilaksanakan (Sampel)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.04.0000 - Pelaksanaan Urutan Pemeliharaan yang Terikat dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				10.000.000,00		10.000.000,00		10.030.000,00		11.030.000,00		12.030.000,00		
Tindaklanjuti Urutan Pemeliharaan yang Terikat dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Sampel Sampel Pengawasan Sampel yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.030.000,00	4	11.030.000,00	4	12.030.000,00		
7.01.02.2.04.0000 - Pelaksanaan Urutan Pemeliharaan yang Terikat dengan Kewenangan Lain yang Dilaksanakan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tindaklanjuti Urutan Pemeliharaan yang Terikat dengan Kewenangan Lain yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lain yang Dilaksanakan (Sampel)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGSARAAN URUSAN PERSEKUTUAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		21.030.000,00		22.030.000,00		22.030.000,00		
Monev/evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Index)	100,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	21.030.000,00	100,00	22.030.000,00	100,00	22.030.000,00	7.01.0-05.0-00-24.00-00 - KECAMATAN KAPANGSAMBUK	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urutan Pengawasan Urutan Pengawasan Setiap Hari				20.000.000,00		20.000.000,00		21.030.000,00		22.030.000,00		22.030.000,00		

REKAM URUTAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelangkaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertakan Penghasilan Perikanan, Peningkatan Usaha Usaha Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peningkatan Bina Desa Tunggul Bina Desa Peningkatan dan Peningkatan Ketahanan Negara Ketahanan Nasional Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Ketrampilan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertakan Penghasilan Perikanan, Peningkatan Usaha Usaha Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peningkatan Bina Desa Tunggul Bina Desa Peningkatan dan Peningkatan Ketahanan Negara Ketahanan Nasional Indonesia (Orang)	33	00	20.000.000.00	33	20.000.000.00	40	21.000.000.00	50	22.000.000.00	53	22.000.000.00			
7.01.00.3.01.001 - Peningkatan Kualitas Kelangkaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertakan Penghasilan Perikanan, Peningkatan Usaha Usaha Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peningkatan Bina Desa Tunggul Bina Desa Peningkatan dan Peningkatan Ketahanan Negara Ketahanan Nasional Indonesia				20.000.000.00		20.000.000.00		21.000.000.00		22.000.000.00		22.000.000.00			
1945, Peningkatan Bina Desa Tunggul Bina Desa Peningkatan dan Peningkatan Ketahanan Negara Ketahanan Nasional Indonesia															
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelangkaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertakan Penghasilan Perikanan, Peningkatan Usaha Usaha Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peningkatan Bina Desa Tunggul Bina Desa Peningkatan dan Peningkatan Ketahanan Negara Ketahanan Nasional Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Ketrampilan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertakan Penghasilan Perikanan, Peningkatan Usaha Usaha Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peningkatan Bina Desa Tunggul Bina Desa Peningkatan dan Peningkatan Ketahanan Negara Ketahanan Nasional Indonesia (Orang)	33	50	21.000.000.00	00	20.000.000.00	50	21.000.000.00	50	22.000.000.00	53	22.000.000.00			
7.01.00 - PROGRAM PEMBERANJIAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00			
Meningkatnya jumlah desa di kabupaten yang melaksanakan APSDs sesuai indikator (%)	Peningkatan desa di kabupaten yang melaksanakan APSDs sesuai indikator (%)	100.00	100.00	90.000.000.00	100.00	90.000.000.00	100.00	90.000.000.00	100.00	90.000.000.00	100.00	90.000.000.00	7.01.00.00.00.00.00 - KECAMATAN KAPANGSAMBAH		
7.01.00.2.01 - Fasilitas, Rencananya dan Koordinasi				90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00			
Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Desa						90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00		90.000.000.00			
Meningkatnya jumlah desa di kabupaten yang melaksanakan APSDs sesuai indikator	Jumlah Desa yang Dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Fasilitas Desa dan Peningkatan Desa (Dokumen)	4	5	90.000.000.00	5	90.000.000.00	5	90.000.000.00	5	90.000.000.00	5	90.000.000.00			
	Jumlah Dokumen Rencananya Peningkatan Peningkatan Desa (Dokumen)	6	7		7		7		7		7				
	Jumlah Dokumen Rencananya Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Desa (Dokumen)	4	14		14		14		14		14				
	Jumlah Dokumen Fasilitas Peningkatan Peningkatan Peningkatan Desa (Dokumen)	9	4		4		4		4		4				

BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peningkatan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peningkatan Pembiayaan Kapasitas Desa (Dokumen)	5	5		11		6		11		6			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peningkatan ke- berlanjutan dan Keberhasilan Usaha (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Rencanan Pembangunan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pengabdian Keumatan Desa dan Kewaspadaan Awal Desa				5.000.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tindak lanjut Fasilitas Pengabdian Keumatan Desa dan Kewaspadaan Awal Desa	Jumlah Dokumen yang Otomatisasi dalam rangka Peningkatan Keumatan Desa dan Kewaspadaan Awal Desa (Dokumen)	4	5	5.000.000,00	4	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Peningkatan Pembiayaan Kapasitas Desa				5.000.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tindak lanjut Fasilitas Peningkatan Pembiayaan Kapasitas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peningkatan Pembiayaan Kapasitas Desa (Dokumen)	5	5	5.000.000,00	11	7.000.000,00	6	5.000.000,00	11	5.000.000,00	7	5.000.000,00		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Penganggaran dan Pembentukan Peningkat Desa				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tindak lanjut Rekomendasi Penganggaran dan Pembentukan Peningkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penganggaran dan Pembentukan Peningkat Desa (Dokumen)	4	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Peningkatan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tindak lanjut Fasilitas Sinkronisasi Peningkatan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Peningkatan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	6	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Peningkatan Keberhasilan dan Keberlanjutan Usaha				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tindak lanjut Fasilitas Peningkatan Keberhasilan dan Keberlanjutan Usaha	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peningkatan dan Keberlanjutan dan Keberlanjutan Usaha (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Peningkatan Peningkatan Pembangunan Partisipatif				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tindak lanjut Fasilitas Peningkatan Peningkatan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peningkatan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	6	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Peningkatan Program dan Pelaksanaan Peningkatan Masyarakat Desa				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tindaklanjut: Fasilitas Perpusnasan Program dan Publikasi dan Pembudayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas (dari rangka Program dan Pelaksanaan Pembudayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1	45.010.204,00	1	45.030.000,00	1	45.030.200,00	1	45.000.000,00		
7.31.06.2.01.0017 - Koordinasi Pembudayaan Desa di Wilayahnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tindaklanjut: Koordinasi Pembudayaan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembudayaan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has increased from 600 million to 800 million. The number of people who are malnourished has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million.

The World Bank has estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.

The World Bank has also estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.

The World Bank has also estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.

The World Bank has also estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.

The World Bank has also estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.

The World Bank has also estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.

The World Bank has also estimated that the number of people who are undernourished in the world will increase from 800 million in 1990 to 1.2 billion in 2020. The number of people who are malnourished will increase from 1.5 billion in 1990 to 2.2 billion in 2020. The number of people who are obese will increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2020.